

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar belakang masalah**

Sebagai negara yang berkembang dengan memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, mulai dari industri kecil sampai besar dan melihat pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah guna memenuhi kewajibannya dalam mensejahterakan rakyat. Maka pemerintah mengoptimalkan berbagai jenis pendapatan negara, salah satunya dari penerimaan pajak baik perorangan maupun badan. Sehingga pemerintah akan memaksimalkan pendapatan pajak untuk membangun infrastruktur-infrastruktur yang dapat memajukan tingkat pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007, bahwa pengertian pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak mendapat imblaan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. Peran pajak sebagai pendapatan terbesar negara, pajak sendiri memberikan kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada dasarnya ketika perekonomian mengalami kenaikan maka pendapatan pemerintah akan mengalami kenaikan terutama pada sektor pajak. Pendapatan pajak bagi pemerintah sendiri adalah untuk membangun seluruh infrastruktur yang ada di wilayah suatu negara yang dimaksudkan untuk kemakmuran warga

negaranya. Untuk meningkatkan pelayanan publik pemerintah membutuhkan pendanaan yang cukup, maka dana dari pajak merupakan sumber utama penerimaan.

Menurut Soemitro, (1982 ) ditinjau dari aspek ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat/perusahaan ke sektor publik/negara yang digunakan untuk membiayai keperluan negara. Sedangkan Adriani (dalam Brotodihardjo, 1998) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak menerima kontra prestasi langsung yang dapat ditunjuk. Pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sistem pemungutan pajak yang mudah dan didukung partisipasi masyarakat dalam bentuk kepatuhan untuk membayar pajak, merupakan impian setiap pemerintahan.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini mengalami kenaikan data diperoleh pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus mengalami kenaikan pertahun. Dari data yang diperoleh dari tahun 2015 pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan 4,88%. Dan pada tahun 2016 terus mengalami kenaikan 5,02%. Kondisi ini terus mengalami kenaikan pertahun, pada 2017 pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 5,1%. ( sumber: *Badan Pusat Statistik* ). Pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari bantuan pemerintah dalam memfasilitasi infrastruktur dan membina sumber daya manusiannya.

Seiring dengan kebijakan pemerintah tentang pendapatan pajak sebagai penunjang pendapatan dana utama untuk mengembangkan perekonomian di Indonesia, maka perlu di perhatikan juga tingkat kesetabilan tingkat harga seiring bertumbuhnya perekonomian di Indonesia. Data dari BPS( *badan pusat statistik* ) menunjukkan bahwa seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari data BPS diperoleh tingkat inflasi yang tinggi di Indonesia dari tahun ke tahun dan sempat turun di tahun 2015. Tingginya tingkat inflasi di Indonesia tahun 2014 adalah 8.36% dan pada tahun 2015 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 3.35%, dan di tahun 2016 sempat turun di angka 3.02% ( *sumber: BPS* ).

Meningkatnya harga yang tinggi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dari data BPS tersebut bisa dikatakan bahwa ada keterkaitan antara saat terjadi pertumbuhan ekonomi maka berpengaruh atau tidak terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Karakteristik tingkat inflasi yang tidak stabil di Indonesia menyebabkan deviasi yang lebih besar dibandingkan biasanya dari proyeksi inflasi tahunan oleh Bank Indonesia. Akibat dari ketidakjelasan inflasi semacam ini adalah terciptanya biaya-biaya ekonomi, seperti biaya peminjaman yang lebih tinggi di negara ini (domestik dan internasional) dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Saat rekam jejak yang baik mengenai mencapai target inflasi tahunan terbentuk, kredibilitas kebijakan moneter yang lebih besar akan mengikutinya.

Tingginya tingkat inflasi di Indonesia juga mempengaruhi kesetabilan harga pangan atau pun non- pangan. Derajat persistensi inflasi di Indonesia relatif masih tinggi dibandingkan dengan di kawasan Asia (Alamsyah, 2008 ) menyatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah dari persistennya inflasi makanan. Karenanya, upaya pengendalian inflasi makanan merupakan faktor penting untuk menurunkan total inflasi. Perubahan kelompok bahan makanan juga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat miskin. Analisa diskriptif pergerakan inflasi makanan dan non- makanan memberikan indikasi adanya keterkaitan antara keduanya. Seperti yang dinyatakan oleh Bhattacharya *et al.* (2013), inflasi pada kelompok makanan dapat memiliki dampak terhadap inflasi non-makanan melalui pergeseran permintaan dari barang makanan ke non-makanan, dan begitu pula sebaliknya (efek substitusi). Peningkatan permintaan barang non-makanan memberikan tekanan terhadap inflasi pada kelompok barang tersebut. Pada akhirnya, inflasi agregat akan mendapat tekanan yang lebih dalam (*second round effect*) jika terdapat peningkatan inflasi pada salah satu kelompok barang. Peningkatan permintaan barang ini tentunya akan memberikan kompleksitas yang lebih rumit dalam pengendalian inflasi agregat.

Harga-harga bahan pangan sangat tidak stabil di Indonesia (rentan terhadap kondisi cuaca) dan kemudian meletakkan beban yang besar kepada rumah tangga-rumah tangga yang berada di bawah atau sedikit di atas garis kemiskinan. Rumah tangga-rumah tangga ini menghabiskan lebih dari

setengah dari pendapatan yang bisa dibelanjakan mereka untuk makanan, terutama beras. Oleh karena itu, harga-harga makanan yang lebih tinggi menyebabkan inflasi keranjang kemiskinan yang serius yang mungkin meningkatkan persentase penduduk miskin. Panen-panen yang gagal dikombinasikan dengan reaksi lambat dari Pemerintah untuk menggantikan produk-produk makanan lokal dengan impor adalah penyebab tekanan inflasi ( sumber: BPS ).

Terlepas dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang sedang terjadi di Indonesia, masalah pajak juga harus diperhatikan dan menjadi hal yang harus mendapatkan porsi yang lebih untuk menanganinya. Pada kenyataannya pembayaran atau Wajib Pajak bisa dimainkan, sehingga mempengaruhi pendapatan pemerintah dan ketika perusahaan menyelewengkan tarif pajak maka akan mempengaruhi penghasilan laba mereka, maka dari pembayaran pajak tersebut perusahaan akan mangkir atau memotong anggaran untuk patuh pajak sehingga tarif pajak mempengaruhi atau tidak tentang pendapatan hasil pajak pemerintah, dan berpengaruh atas laba yang di hasilkan perusahaan.

Selain sebagai sumber penerimaan (*budgetair*), pajak juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi *regulerend*. Menteri Keuangan mengatakan selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, penerimaan pajak juga akan diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas (*Fiscal News*).

2007). Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain yaitu: besarnya penghasilan, tarif pajak, persepsi wajib pajak atas penggunaan uang pajak, perlakuan perpajakan, pelaksanaan penegakan hukum, berat (ringan) sanksi perpajakan, dan kelengkapan dan keakuratan database (Alm, Bahl, Murray. 1990; Alm, Jackson, McKee. 1992; Witte dan Woodbury (1985), Dubin dan Wilde (1988), Andreoni *et al.* 1998; Alm.1991).

Pendapatan pajak juga dipengaruhi oleh kepatuhan pajak, baik wajib pajak individual maupun wajib pajak badan. Terdapat banyak sekali sumber pendapatan pajak bagi pemerintah, yang telah diatur dalam undang-undang negara. Pendapatan pajak juga dipengaruhi oleh besaran tarif pajak yang berlaku dan diukur dengan presentase tingkat golongan pendapatan. Semakin besar pendapatan ataupun penghasilan maka tingkat tarif pajak juga akan tinggi. Ketika harga permintaan semakin tinggi maka bagaimana implikasinya terhadap pendapatan pajak. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang sedang berjalan di Indonesia akan berpengaruh terhadap pendapatan pajak.

Menurut Choiruman (2004), berhubung penerimaan pajak dibutuhkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan, Pemerintah akan terus berupaya menggali potensi pajak (*tax coverage*) seoptimal mungkin dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (*taxpayers' compliance*). Namun upaya tersebut akan menghadapi

berbagai kendala antara lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat (*taxpayers' awareness*) untuk membayar pajak, belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan di bidang perpajakan, dan banyak potensi pajak yang belum tergali dan terealisasi secara optimal sehingga *tax ration*nya rendah (Kurniawan, 2004).

Seiring dengan berkembangnya tren dikalangan masyarakat tentang bermacam-macam dan keanekaragaman makanan dan minuman. Terlalu banyaknya produk di pasaran hal ini memacu persaingan terhadap para pelaku bisnis di dunia *food and baverage*. Sehingga tidak bisa di pungkiri bahwa bidang ini juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sehingga perlu di perhatikan bahwa pemerintah harus bisa mengontrol tingkat kestabilan harga sehingga inflasi dapat di kendalikan. Namun pelaku dalam bidang ini akan menggunakan cara supaya laba yang mereka inginkan dapat tercapai. Lalu peran pemerintah mengendalikan tingkat kestabilan harga sehingga inflasi tidak terjadi.

Terlepas dari masalah yang mungkin akan timbul dari bidang *food and baverage* maka pemerintah memberlakukan tarif pajak bagi pelaku bisnis tersebut. Bagaimana sudah dijelaskan hukum pajak pada UU yang mengatur tentang tarif pajak, jika tarif pajak di ukur dengan presentasi pendapatan ataupun penghasilan yang di dapat. Secara tidak langsung maka pelaku bisnis ini bisa di kategorikan sebagai wajib pajak. Pemerintah berhak

memberlakukan tarif pajak yang berlaku, sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang.

Pengawasan baik untuk wajib pajak dan juga pemerintah juga perlu diawasi. Dimana Wajib Pajak harus patuh pada perundang-undangan sesuai tarif pajak yang berlaku dan tertib membayar pajak sesuai kategori tarif pajak yang telah dibuat oleh badan hukum pemerintahan. Pengawasan pemerintah juga perlu diperhatikan supaya Wajib Pajak patuh membayar pajak dan penghindaran pajak. Secara tidak langsung perusahaan pasti akan memikirkan cara supaya pendapatan laba semakin besar. Salah satunya dengan memangkas anggaran pajak. Jika terbukti pemotongan pajak ini akan mempengaruhi laba yang dihasilkan oleh perusahaan hal ini akan mempengaruhi pendapatan pajak bagi pemerintah dan apa upaya pemerintah untuk menangani hal ini.

Dalam kata lain yang ada pada PSAK, kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip ataupun metode-metode yang spesifik membahas yang berkaitan dengan laporan keuangan dan prinsip akuntansi. Kebijakan akuntansi meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Beberapa jenis kebijakan akuntansi dapat digunakan untuk subjek yang sama. Pertimbangan dan atau pemilihan perlu disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi perusahaan secara tepat

dalam bentuk keadaan keuangan dan hasil operasi. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

SAK (standar akuntansi keuangan) menentukan kebijakan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berisi informasi relevan dan andal atas transaksi, peristiwa dan kondisi lain. Kebijakan akuntansi tersebut tidak perlu diterapkan ketika dampak penerapannya tidak material. Namun, adalah tidak tepat untuk membuat, atau membiarkan ketidaktepatan, penyimpangan dari SAK untuk mencapai suatu penyajian tertentu atas posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas. SAK dilengkapi dengan panduan untuk membantu entitas dalam menerapkan persyaratan dalam SAK. Panduan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SAK bersifat wajib diterapkan (*mandatory*). Sementara panduan yang bukan bagian tidak ter pisahkan dari SAK tidak berisi pengaturan untuk laporan keuangan. Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang serupa, kecuali suatu PSAK secara spesifik mengatur atau mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda adalah hal yang tepat. Jika suatu PSAK mengatur atau mengizinkan pengelompokan tersebut, maka kebijakan akuntansi yang tepat dipilih dan

diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok, dituturkan oleh Kurniasari,(2014).

Mengingat tren yang sedang berkembang, dan terfokus pada pembahasan tentang inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tarif pajak, dan bagaimana pengaruh pada perusahaan *food and baverage* yang saat ini sedang mengalami pertumbuhan baik dari segi makanan maupun minuman yang saat ini sangat banyak dan persaingan antar perusahaan sehingga banyak pelaku bisnis dibidang ini, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang penerimaan pajak dari *food and baverage*, sehingga penelitian ini akan membahas tentang penerimaan pajak dari *food and baverage*. Berorientasi dari beberapa pembahasan latar belakang diatas maka penulis akan melakukan beberapa penelitian terkait topik tersebut. Dan penulis akan membuat karya tulis dengan topik tersebut dengan judul **“Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Tarif Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Kebijakan Akuntansi (Studi Kasus Pada Perusahaan Food and Baverage Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2017)“**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

- A. Apakah inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
- B. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
- C. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?

- D. Apakah kebijakan akuntansi memperkuat hubungan inflasi dengan penerimaan pajak?
- E. Apakah kebijakan akuntansi memperkuat hubungan pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan pajak?
- F. Apakah kebijakan akuntansi memperkuat hubungan tarif pajak dengan penerimaan pajak?

### **1.3. Batasan Masalah**

Untuk memaksimalkan penelitian dan penulisan supaya nantinya penelitian dapat terfokus maka dalam hal ini penulis membatasi pada:

- A. Tarif pajak dan pendapatan pajak pada tarif badan pada sektor *food and baverage*.
- B. Data periode tahun 2015- 2017 di Indonesia.
- C. Inflasi tahunan.
- D. Kebijakan akuntansi yang digunakan adalah metode persediaan.
- E. Penerimaan pajak pada pajak penghasilan badan.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

- A. Untuk mengetahui apakah inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

- B. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
- C. Untuk mengetahui apakah tarif pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
- D. Untuk mengetahui apakah kebijakan akuntansi memperkuat hubungan inflasi dengan penerimaan pajak.
- E. Untuk mengetahui apakah kebijakan akuntansi memperkuat hubungan pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan pajak.
- F. Untuk mengetahui apakah kebijakan akuntansi memperkuat hubungan tarif pajak dengan penerimaan pajak.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

#### **A. Untuk Pemerintah**

Penelitian ini nantinya dapat membantu pemerintah dalam menganalisa pendapatan pajak negara. Penulis berharap penelitian ini, dimaksudkan untuk mengidentifikasi apakah dalam tarif pajak dapat ditekan sehingga mempengaruhi pendapatan pajak negara.

#### **B. Untuk Universitas**

Sebagai syarat lulus dan tugas akhir dari Universitas untuk mewujudkan cita-cita universitas dengan visi- misi yang telah diterapkan. Sehingga memberikan imbas baik kepada Universitas dengan penulisan

penelitian ini penulis dapat melanjutkan ke tingkat selanjutnya dan tidak menutup kemungkinan akan membawa nama baik Universitas.

#### C. Untuk Pembaca

Dapat memberi gambaran dan pengertian apa itu pajak, tarif pajak, pendapatan pajak, tingkat pertumbuhan ekonomi, maupun inflasi. Sehingga penulis bermaksud lewat penelitian ini akan memberi gambaran yang jelas tentang pengendalian pajak maupun pendapatan pajak.

#### D. Untuk Penulis

Sebagai tugas akhir syarat lulus dan menggali lebih dalam lagi tentang perpajakan negara. Sehingga setelah penelitian selesai kemampuan untuk hasil penelitian ini dapat berimbas di dunia kerja yang nantinya akan digunakan sebagai kemampuan dasar saat masuk di dunia kerja.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

#### BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II: Landasan Teori

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai inflasi, pertumbuhan ekonomi, tarif pajak, penerimaan pajak, dan kebijakan akuntansi. Bab 2 juga terdapat

hipotesis dan kerangka pemikiran dari penelitian ini.

### BAB III: Metode Penelitian

Bab ini membahas sampel data populasi penelitian, sumber data dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data, variabel penelitian. Metode analisis data, pengujian instrumen pengukuran, dan uji analisis data menggunakan *software* SPSS.

### BAB IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian, hasil dari semua alat uji yang digunakan serta pengujian hipotesis.

### BAB V: Kesimpulan Dan Saran

Bab ini meliputi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran. Keterbatasan penelitian merupakan kekurangan dan kelemahan dalam penelitian, sedangkan saran mengacu pada keterbatasan penelitian ini untuk peneliti selanjutnya.